

## GAMPONG ACCELERATION: SOCIAL ENGINEERING AND NEW CONVERGENCE TOWARDS STUNTING-FREE PIDIE

ZULKARNAINI  
Bappeda Kabupaten Pidie  
*zulkarnainiismail70@gmail.com*

### ABSTRAK

Penurunan prevalensi stunting merupakan agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia yang kritis. Kabupaten Pidie secara makro mencatat angka prevalensi stunting yang tergolong memuaskan yakni sebesar 5,51%. Namun, pencapaian agregat tersebut menyembunyikan disparitas spasial yang ekstrem di desa-desa lokus rentan, seperti Desa Pulo Jeumpa yang menyentuh angka darurat 26,67%. Makalah kebijakan (Policy Paper) ini ditujukan untuk mengurai fenomena paradoks tersebut dengan membedah dua akar persoalan utama: disfungsi tata kelola akibat tingginya ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam eksekusi konvergensi, serta stagnasi transformasi perilaku komunal akibat cengkeraman residu kultural dan mitos pengasuhan anak. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 50 informan kunci di tingkat tapak. Formulasi strategi diekstraksi menggunakan analisis Matriks SWOT, yang kemudian dievaluasi secara komparatif melalui instrumen kriteria William Dunn. Hasil sintesis penilaian membuktikan bahwa intervensi pembangunan fisik dan birokrasi konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, naskah ini merekomendasikan alternatif "Integrasi Tata Kelola Inovatif dan Rekayasa Sosial" sebagai solusi paling efektif. Rekomendasi konkret ditujukan kepada Bupati Pidie untuk merumuskan Peraturan Bupati yang memandatkan penerapan budget tagging (penguncian anggaran bersyarat) bagi OPD terkait, serta mengafirmasi pemanfaatan Dana Desa guna membiayai pelibatan ulama dan tokoh adat sebagai agen rekayasa sosial. Solusi holistik ini diyakini mampu mendobrak sekat birokrasi sekaligus meruntuhkan mitos gizi demi menyelamatkan masa depan generasi emas Pidie.

**Kata Kunci:** *Stunting, Rekayasa Sosial, Tata Kelola Inovatif, Konvergensi Anggaran, Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Pidie.*

### ABSTRACT

*Reducing the prevalence of stunting is a highly critical priority agenda for human resource development. At the macro level, Pidie Regency recorded a relatively satisfactory stunting prevalence rate of 5.51%. However, this aggregate achievement conceals extreme spatial disparities in vulnerable locus villages, such as Pulo Jeumpa Village, which reached an emergency rate of 26.67%. This policy paper aims to unravel this paradoxical phenomenon by dissecting two main root causes: governance dysfunction due to high sectoral egos among Regional Apparatus Organizations (OPD) in executing policy convergence, and the stagnation of communal behavior transformation driven by the strong grip of cultural residues and child-rearing myths. This study employs a qualitative methodology through a case study approach and Focus Group Discussions (FGD) involving 50 key informants at the grassroots level. Strategy formulation was extracted using SWOT Matrix analysis, which was then comparatively evaluated using William Dunn's criteria instrument. The synthesis of the assessment proves that conventional physical development and bureaucratic interventions are no longer adequate. Therefore, this paper recommends the "Integration of Innovative Governance and Social Engineering" alternative as the most effective solution. Concrete recommendations are directed to the Regent of Pidie to formulate a Regent Regulation mandating the implementation of conditional budget tagging for related OPDs, as well as affirming the utilization of Village Funds to finance the involvement of clerics and traditional leaders as agents of social engineering. This holistic solution is firmly believed to be capable of dismantling bureaucratic barriers while breaking down nutritional myths to save the future of Pidie's golden generation.*

**Keywords:** *Stunting, Social Engineering, Innovative Governance, Budget Convergence, Policy Evaluation, Pidie Regency.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas adalah fondasi krusial bagi kemajuan suatu entitas pemerintahan di era global yang kompetitif. United Nations Development Programme (2023) dalam laporannya secara tegas menyatakan bahwa kualitas hidup dan kapasitas produktivitas manusia sangat ditentukan oleh terpenuhinya akses kesehatan dasar serta kecukupan nutrisi sejak anak berusia dini. Hal ini diperkuat oleh proyeksi dari Kementerian PPN/Bappenas (2025) yang mengingatkan bahwa kegagalan negara dalam mengawal investasi pada periode seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) akan berimplikasi pada kerugian ekonomi jangka panjang akibat defisit perkembangan kognitif generasi penerus. Oleh sebab itu, agenda percepatan penurunan prevalensi stunting dewasa ini telah bertransformasi menjadi prioritas pembangunan nasional yang amat strategis, yang mana kebijakan publik di tingkat daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam berbagai aksi nyata yang menyentuh urat nadi masyarakat.

Stunting sejatinya bukanlah sekadar persoalan klinis terkait terhambatnya tinggi badan anak, melainkan sebuah manifestasi kasatmata dari karut-marutnya kesehatan masyarakat yang memiliki akar masalah sangat multidimensi. World Health Organization (2024) memvalidasi bahwa malnutrisi kronis yang menjadi penyebab hambatan perkembangan otak sangat berkaitan erat dengan faktor eksternal di luar genetika, seperti buruknya sanitasi lingkungan, keterbatasan akses air bersih, dan kekeliruan pola asuh. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan (2024) melaporkan bahwa meskipun kurva prevalensi nasional mulai melandai, tingkat disparitas sebaran kasus antar-wilayah masih menjadi kendala paling alot. Petunjuk Teknis Aksi Konvergensi yang diterbitkan pada tahun 2025 juga telah memberikan peringatan dini bahwa tanpa adanya integrasi kebijakan yang solid melintasi batas-batas sektoral, maka segenap daya upaya penanganan stunting di daerah hanya akan tereduksi menjadi sekadar rutinitas pemenuhan syarat administratif tanpa melahirkan dampak biologis yang riil pada balita.

Kabupaten Pidie, sebagai salah satu penyangga demografi utama di Provinsi Aceh, terus berupaya memacu indikator kesejahteraan masyarakatnya melalui implementasi berbagai program intervensi. Rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie (2025) mencatat tren perbaikan yang konsisten pada indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut. Namun, realitas empiris memperlihatkan bahwa capaian IPM yang gemilang tidak otomatis menihilkan ancaman krisis kesehatan dasar seperti stunting di bentang wilayah pelosok. Laporan Analisis Situasi Stunting Kabupaten Pidie (2025) membongkar adanya korelasi sosiologis yang sangat pekat antara kantong-kantong kemiskinan dengan tingginya prevalensi balita gagal tumbuh. Kontradiksi antara pesatnya pertumbuhan indikator makro-ekonomi dan lambannya pemulihan derajat kesehatan mikro ini menuntut adanya sebuah tinjauan ulang secara menyeluruh atas efektivitas, efisiensi, dan keadilan dari kebijakan yang dianut oleh pemerintah daerah.

Paradoks data yang lebih mengkhawatirkan justru muncul dari dinamika penurunan stunting di Kabupaten Pidie pada tahun berjalan. Laporan Analisis Situasi Stunting (2025) mengungkapkan bahwa prevalensi stunting secara agregat di tingkat kabupaten hanya berada pada angka 5,51 persen. Angka capaian yang secara matematis berada jauh di bawah ambang toleransi nasional sebesar 14 persen ini, secara teoretis seolah menempatkan Kabupaten Pidie pada "zona aman". Akan tetapi, penelaahan statistik yang dilakukan dengan pembesaran resolusi ke tingkat wilayah administrasi terkecil mengungkap ilusi keberhasilan tersebut; Desa Pulo Jeumpa, misalnya, menanggung beban prevalensi ekstrem yang melesat hingga ke angka 26,67 persen. Bappenas (2025) telah mengingatkan tentang sindrom "bahaya rata-rata" di mana kepuasan semu atas statistik makro sering kali membuat para pemangku kebijakan menjadi rabun dan abai terhadap kantong-kantong krisis akut yang terserak di tingkat gampong.

Akar dari ketimpangan spasial tersebut bermuara pada rapuhnya tatanan tata kelola birokrasi dan gagalnya sinkronisasi program antar instansi. Laporan Analisis Situasi Stunting (2025) menengarai bahwa dalih klasik berupa keterbatasan kapasitas fiskal selalu dikedepankan sebagai kambing hitam atas belum maksimalnya intervensi di tingkat desa. Padahal, Juknis Aksi Konvergensi (2025) secara filosofis menegaskan bahwa jantung dari konvergensi adalah ketepatan menembak sasaran secara lintas program, bukan semata-mata soal volume kucuran dana. Ego sektoral yang masih mengakar kuat di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi dinding penghalang yang membuyarkan upaya pengintegrasian paket bantuan, sehingga sasaran keluarga rentan tidak menerima layanan secara komprehensif.

Di samping kemacetan mesin birokrasi, faktor perilaku masyarakat merupakan determinan krusial yang teramat sering lolos dari bidikan intervensi kebijakan pemerintah daerah. Literasi pengasuhan, terutama yang bertautan dengan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) serta asupan protein hewani, masih menjadi kendala utama karena masyarakat masih terbelenggu oleh kuatnya residu kultural dan mitos. UNICEF Indonesia (2023) dalam risetnya mengafirmasi bahwa rendahnya pemahaman gizi dari para ibu berkorelasi kuat dengan tingginya tingkat kegagalan pemberian ASI eksklusif. Akibatnya, sebagus apapun intervensi sensitif fisik seperti pengadaan jamban sehat dan air bersih komunal dibangun oleh negara, program tersebut akan memuai sia-sia tanpa dibarengi upaya rekayasa sosial yang bertujuan memodifikasi kebiasaan higienitas dan pola pikir massa secara radikal.

Atas dasar pertimbangan urgensi dari rentetan anomali di atas, kajian kebijakan (*Policy Paper*) ini digagas untuk melahirkan rumusan wawasan baru yang sanggup merajut celah-celah kelemahan eksisting. Berbeda dengan berbagai kajian terdahulu yang umumnya hanya terpaku pada teknokrasi medis atau manajemen pembiayaan secara parsial, tulisan ini memfokuskan dirinya pada penyusunan tata aturan yang mengawinkan pendekatan humanis dengan ketegasan sistem birokrasi. Berdasarkan hasil telaah mendalam, maka rumusan masalah (*problem statement*) utama yang diangkat dalam naskah ini adalah: "Terjadinya stagnasi transformasi perilaku kesehatan komunal dan disfungsi konvergensi tata kelola di tingkat tapak, yang mengakibatkan kelumpuhan penanganan dan melanggengkan siklus stunting ekstrem di desa-desa

lokus rentan, di tengah bias ilusi keberhasilan angka agregat kabupaten yang tampak rendah".

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang menggunakan metodologi kualitatif dengan mengaplikasikan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat analitis dan evaluatif. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memahami anatomi masalah, pemaknaan aktor lokal, serta hambatan sosio-kultural yang tidak mungkin direkam secara menyeluruh hanya dengan menggunakan instrumen statistik kuantitatif. Lokus studi kasus difokuskan secara afirmatif pada gampong-gampong yang memiliki anomali angka stunting pada skala ekstrem, seperti Desa Pulo Jeumpa, guna memastikan bahwa proses triangulasi data benar-benar menukik pada jantung krisis yang sesungguhnya.

Data primer penelitian ini dihimpun secara terstruktur melalui teknik *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengikutsertakan 50 orang responden sebagai informan kunci yang direkrut secara *purposive*. Partisipan FGD tersebut secara representatif mewakili unsur elit birokrat pembuat kebijakan (seperti unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, dan DPMG), aktor pelaksana tingkat tapak (Bidan Desa dan Kader Pembangunan Manusia), simpul otoritas informal masyarakat (Keuchik, Tuha Peuet, serta kalangan ulama dan tokoh adat), hingga kelompok sasaran akhir yaitu para ibu dari balita penyintas stunting. Selain data primer, penelitian ini didukung oleh elaborasi data sekunder yang ditarik dari *Laporan Analisis Situasi Stunting Kabupaten Pidie (2025)*, dokumen *Kabupaten Pidie Dalam Angka 2026*, serta *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Aksi Konvergensi* dari Kementerian Dalam Negeri (2025). Seluruh himpunan data kualitatif dan kuantitatif makro tersebut kemudian dikodifikasi dan diproses untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka Matriks SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) serta Analisis TOWS guna memformulasikan strategi alternatif kebijakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoretis dan Kesenjangan Kebijakan Tata Niaga**

Proses merumuskan sebuah arsitektur kebijakan publik yang solid mutlak mensyaratkan adanya pijakan paradigma teoretis yang teruji untuk membedah akar kesenjangan antara teks regulasi dengan konteks tata niaga pelayanan di dunia nyata. Dalam analisis ini, kerangka pemikiran utama disandarkan pada Teori *Collaborative Governance* (Tata Kelola Kolaboratif) yang dielaborasi oleh Ansell dan Gash (2008), yang mempostulatkan bahwa penyelesaian permasalahan lintas dimensi, seperti halnya epidemi stunting, mustahil didekati dengan gaya kerja birokrasi ortodoks yang mengagungkan fragmentasi kelembagaan. Teori ini menggarisbawahi urgensi pembentukan sebuah desain institusional pemaksa yang mensyaratkan pelibatan otoritas multisektoral untuk berbagi kewenangan dan meleburkan programnya ke

dalam satu lokus sasaran yang sama secara setara dan akuntabel. Kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang terjadi di Kabupaten Pidie adalah mandeknya amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Juknis Kemendagri 2025 pada tataran administratif belaka. Ketiadaan instrumen tata kelola yang membelenggu ego sektoral mengakibatkan setiap dinas merancang dan mengalirkan pagu anggaran kegiatannya secara *silo* dan sporadis, sehingga asas konvergensi yang diamanatkan regulasi nasional tersebut gagal bermanifestasi menjadi *output* yang terpadu di desa-desa sasaran.

Untuk menambal kelemahan pada suprastruktur birokrasi tersebut, kajian ini juga menempatkan Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*) gagasan Robert Putnam (1993) sebagai basis untuk mengurai stagnasi pada infrastruktur kultural. Putnam mengajarkan bahwa himpunan jaringan sosial, tradisi, dan rasa saling percaya yang merekat kuat di dalam suatu entitas komunal merupakan modal tidak berwujud yang berpotensi memfasilitasi koordinasi massal demi mencapai tujuan bersama. Di Kabupaten Pidie yang memiliki corak masyarakat sangat religius dan kental dengan patronase, suara kepatuhan kepada figur otoritas informal (seperti Ulama, Tengku, dan Tuha Peuet) jauh mendominasi sendi-sendi kehidupan warga jika disandingkan dengan imbauan medis formal dari aparaturnegara. Kesenjangan sosiologis yang mencolok saat ini adalah keengganan regulasi daerah untuk melembagakan dan membiayai modal sosial luhur tersebut sebagai instrumen "Rekayasa Sosial" dalam membongkar mitos-mitos gizi serta mendorong transformasi perilaku higienitas sanitasi dari dalam rumah tangga.

### **Kuantifikasi Faktor Strategis Melalui Matriks IFE dan EFE**

Dalam upaya mentransformasikan ragam temuan kualitatif deskriptif dari forum diskusi kelompok terpumpun menjadi basis pengambilan keputusan yang presisi dan tidak terbantahkan, dilakukan kuantifikasi terhadap setiap elemen penyusun arsitektur penanganan stunting melalui formulasi Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Eksternal (EFE).

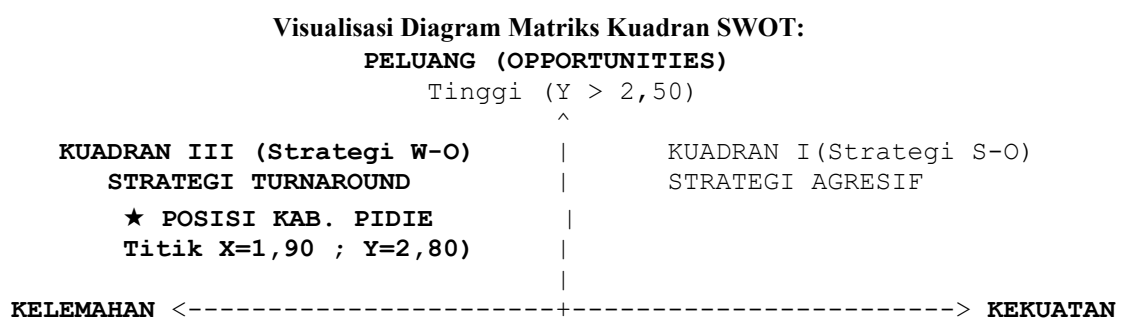
Penelaahan atas postur dapur internal birokrasi daerah (Matriks IFE) menyingkap fakta bahwa komponen Kekuatan (*Strengths*) utamanya ditopang oleh keberadaan organ infrastruktur sosial dan jejaring pasukan akar rumput yang tersebar luas (dengan pembobotan 0,15 dan pemeringkatan 3), serta wibawa regulatif Bappeda yang seyogianya mampu mengunci aliran penjabaran anggaran masing-masing OPD (dengan pembobotan 0,20 dan pemeringkatan 4). Kendati demikian, modal kekuatan tersebut nyatanya takluk tak berdaya ketika dibenturkan dengan komponen Kelemahan (*Weaknesses*) yang sangat masif menggerogoti efektivitas kerja pemerintahan. Kelemahan tersebut bermuara pada lumpuhnya sistem pemantauan dinamika pertumbuhan balita yang masih dioperasikan secara manual dan terputus dari *real-time dashboard* (dengan pembobotan 0,30 dan pemeringkatan 1), yang makin diperburuk oleh parahnya mentalitas ego sektoral dan tercerai-berainya eksekusi program di level desa lokus (dengan pembobotan 0,35 dan pemeringkatan 1). Hasil proses ekstraksi matematika pada Matriks IFE ini menorehkan total skor sebesar **1,90**. Perolehan skor yang anjlok ke dasar (jauh dari nilai ekuilibrium 2,50) tersebut secara sah

menyimpulkan bahwa kesehatan manajerial internal penanganan stunting di Pidie tengah mengidap penyakit kronis (lemah) dan tidak sanggup lagi dipertahankan dengan gaya kepemimpinan *business as usual*.

Bergerak ke ranah yang lebih luas, analisis Matriks EFE dirancang untuk mengukur tingkat responsivitas pemerintah daerah dalam mendayagunakan faktor-faktor di luar jangkauan birokrasi langsung. Klaster Peluang (*Opportunities*) memancarkan pendar harapan melalui sangat besarnya daya dukung fleksibilitas pemanfaatan Dana Desa yang secara regulasi sangat dimungkinkan untuk mendanai inisiatif inovasi lokal maupun program rekayasa sosial (dengan pembobotan 0,30 dan pemeringkatan 4). Peluang ini kian menguat berkat suntikan legitimasi mandat vertikal dari Juknis Kemendagri 2025 yang menitahkan keharusan penerapan mekanisme konvergensi multisektor yang terukur (dengan pembobotan 0,20 dan pemeringkatan 3). Berhadapan dengan peluang tersebut adalah klaster Ancaman (*Threats*) yang digerakkan oleh kentalnya belenggu residu kultural, mitos seputar pengasuhan anak, dan kebiasaan sanitasi kumuh yang terbukti kebal dari sekadar intervensi pengadaan fisik semata (dengan pembobotan 0,30 dan pemeringkatan 2), ditambah momok mengerikan berupa anomali disparitas spasial ekstrem di titik krisis Pulo Jeumpa yang siap meledakkan kembali rasio rata-rata prevalensi kabupaten (dengan pembobotan 0,20 dan pemeringkatan 2). Akumulasi hitungan pada Matriks EFE ini berhasil mencatatkan skor akhir sebesar **2,80**. Raihan skor di atas titik moderat (2,50) ini merupakan justifikasi ilmiah yang teramat melegakan, karena mengindikasikan bahwa hamparan peluang eksternal yang tersedia sesungguhnya jauh lebih digdaya dan sangat memadai untuk digunakan sebagai proyektil pamungkas guna menghancurkan ancaman budaya di lapangan.

### Diagnosis Matriks Kuadran SWOT

Pengawinan antara koordinat hasil evaluasi kelemahan internal yang teramat mencolok (IFE: 1,90) dengan besarnya ketersediaan karpet peluang eksternal (EFE: 2,80) memplot posisi strategis Pemerintah Kabupaten Pidie secara presisi pada diagram geometri Cartesian. Visualisasi dari titik ordinat ( $X=1,90$  ;  $Y=2,80$ ) ini secara absolut membenamkan arah kebijakan Kabupaten Pidie tepat di jantung **Kuadran III (Strategi W-O atau Weakness-Opportunity)**.



(WEAKNESSES)	(Titik Nol / 2,50)	(STRENGTHS)
Internal Lemah ( $X < 2,50$ )		Internal Kuat ( $X > 2,50$ )
KUADRAN IV (Strategi W-T)		KUADRAN II (Strategi S-T)
STRATEGI DEFENSIF		STRATEGI DIVERSIFIKASI

v

**ANCAMAN (THREATS)**  
Rendah ( $Y < 2,50$ )

Di dalam disiplin ilmu manajemen strategis, bermukim di Kuadran III berarti entitas tersebut harus berlapang dada menerima diagnosis bahwa strategi masa lampau telah usang, dan diwajibkan untuk segera mengadopsi apa yang disebut sebagai **Strategi Turnaround (Putar Haluan/Retrenchment)**. Mempertahankan pendekatan agresif murni seperti menghamburkan sisa APBD untuk membangun infrastruktur fisik tambahan secara sporadis hanya akan berujung pada pendarahan fiskal yang kian parah karena akar penyakitnya, yakni kerusakan mesin manajerial birokrasi dan kekeliruan paradigma perilaku, tidak kunjung diobati. Dengan demikian, pedoman arah navigasi bagi pemerintah adalah mengunci kelemahan ego sektoral dan menghentikan keterlambatan deteksi dini dengan cara memompa sebesar-besarnya energi regulasi pusat dan kekuatan uang dari Dana Desa sebagai tuas pengungkit perubahan fundamental.

### Formulasi Strategi Melalui Analisis TOWS

Guna meracik formulasi yang lebih tajam dan aplikatif berdasarkan ketetapan Kuadran III tersebut, kajian ini mendayagunakan analisis Matriks TOWS untuk menyaring dan menyilangkan komponen-komponen SWOT secara spesifik ke dalam empat kuadran matriks operasional, dengan memfokuskan porsi terbesarnya pada penjabaran Strategi W-O (*Turnaround*).

Gugusan **Strategi W-O** memegang peranan sentral sebagai detak jantung bagi revolusi tata kelola di tingkat kabupaten. Pertama, untuk menghancurkan barikade ego sektoral antar-OPD yang merupakan kelemahan fatal (W2), Bappeda direkomendasikan merilis instrumen pemaksa dengan memanfaatkan legitimasi mutlak Juknis Kemendagri 2025 (O2). Instrumen pemaksa ini berwujud penerapan mekanisme *budget tagging* (penandaan anggaran bersyarat) yang diikat dengan sistem *reward and punishment*; di mana setiap Rencana Kerja (Renja) OPD teknis tidak akan pernah diloloskan ke tahap evaluasi APBD manakala tidak mencantumkan daftar nama desa lokus merah stunting secara keroyokan dan terintegrasi dalam bauran program kegiatannya. Kedua, untuk mengobati kelemahan kelumpuhan pada sistem pemantauan pelaporan konvensional (W1), daerah didesak untuk mengkapitalisasi fleksibilitas peruntukan dari regulasi Dana Desa (O1). Dana Desa tersebut dialihkan wujudnya menjadi investasi pembangunan platform dasbor digital *real-time* gampong, yang kelak menjamin bahwa setiap gram fluktuasi berat badan balita dapat langsung dipantau dari meja layar eksekutif pimpinan kabupaten.

Pada sayap yang lain, gugusan **Strategi S-T** diracik guna melakukan orkestrasi perlawanan terhadap kerasnya mitos budaya dan residu perilaku di lingkungan warga. Otoritas Bappeda dituntut untuk memobilisasi barisan pahlawan akar rumput (Kader

Pembangunan Manusia dan aparaturnya gampong) yang diposisikan sebagai pilar kekuatan (S1) guna mengeksekusi misi "Rekayasa Sosial". Gerakan ini didesain tidak untuk mengedukasi warga menggunakan jargon medis yang elit, melainkan merangkul dan melembagakan eksistensi tokoh ulama dan pimpinan majelis adat secara komunal ke dalam mesin satgas kesehatan gampong guna memfatwakan dan meruntuhkan tabu pengasuhan gizi keliru yang bersemayam kuat di tengah masyarakat (T1), khusus difokuskan pada episentrum anomali seperti Desa Pulo Jeumpa (T2).

Guna menjadi katup pelumas bagi jalannya mesin perubahan sosial tersebut, **Strategi S-O** diinjeksikan dengan cara menerbitkan regulasi tegas berupa Peraturan Bupati yang memandatori Dana Desa (O1) agar diharamkan untuk hanya terserap membiayai bangunan fisik semata, melainkan wajib digunakan untuk menggaransi pembayaran insentif jerih payah pasukan kader akar rumput (S1) secara sangat manusiawi dan berkelanjutan. Sebagai pamungkas dan penyedia payung proteksi terakhir, **Strategi W-T** dirumuskan dalam wujud tindakan intervensi darurat; di mana desa-desa yang terdiagnosis menyanggah status krisis stunting kronis (T2) harus segera diisolasi dan di-*bypass* langsung intervensi penanganannya di bawah komando eksklusif dari Satgas Kabupaten, memangkas seluruh tahapan antrean birokrasi dan kemacetan data reguler (W1 dan W2) demi pacuan berpacu dengan waktu menyelamatkan sisa kecerdasan kognitif sang bayi. Elaborasi komprehensif dari keempat pilar taktis inilah yang diyakini secara saintifik akan sanggup mengubah rupa wajah kebijakan pengentasan stunting dari yang semula hanya sebagai ladang penyerapan seremonial birokrasi menjadi sebuah arena gerakan moral kebangsaan yang utuh di Kabupaten Pidie.

### Alternatif Pemilihan Kebijakan

Menghadapi kompleksitas krisis stunting yang berkelindan antara disfungsi birokrasi dan stagnasi kultural, kajian ini merumuskan tiga alternatif kebijakan sebagai respons taktis yang saling komparatif. Alternatif pertama mengedepankan rekayasa kelembagaan melalui mekanisme *budget tagging* atau konvergensi anggaran yang bersifat mengikat secara hukum. Melalui skema ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendayagunakan otoritas absolutnya untuk mengunci Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar berfokus secara eksklusif pada desa-desa lokus prioritas. Alternatif kedua menitikberatkan pada rekayasa sosial komunal berbasis kearifan lokal yang didanai sepenuhnya melalui optimalisasi fleksibilitas Dana Desa. Opsi ini mendesain intervensi kultural dengan memobilisasi para tokoh agama dan tetua adat setempat guna membongkar mitos pengasuhan, seraya memberikan insentif finansial yang berkeadilan bagi Kader Pembangunan Manusia di tingkat gampong. Sementara itu, alternatif ketiga menawarkan sebuah pendekatan holistik yang memadukan dan mengintegrasikan tata kelola inovatif di tingkat hulu birokrasi dengan rekayasa sosial di tingkat hilir masyarakat. Pendekatan hibrida ini mengawinkan ketegasan instrumen *budget tagging* lintas sektoral dengan pelembagaan sistem pemantauan digital yang ditopang oleh kekuatan modal sosial gampong.

Guna menghindari bias subjektivitas dalam menetapkan pilihan intervensi terbaik untuk diimplementasikan, ketiga alternatif tersebut dievaluasi secara komparatif menggunakan instrumen kriteria analisis kebijakan publik gagasan William Dunn (2018). Evaluasi ini bersandar pada enam kriteria pengukuran yang sangat presisi, meliputi tingkat efektivitas dalam menuntaskan akar masalah utama, efisiensi penggunaan dukungan sumber daya fiskal, kecukupan atau derajat ketuntasan penyelesaian solusi, pemerataan keadilan distribusi manfaat bagi desa lokus merah, responsivitas terhadap dinamika kebutuhan sasaran kader di lapangan, serta ketepatan atau keselarasan keadilan dengan nilai-nilai sosiokultural masyarakat lokal di Kabupaten Pidie.

Hasil penapisan dan pembobotan kriteria William Dunn memperlihatkan disparitas kapasitas yang sangat mencolok di antara ketiga opsi alternatif tersebut. Alternatif pertama terbukti sangat efisien dalam menertibkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena secara administratif sukses mencegah praktik tumpang tindih program dinas. Kendati demikian, opsi ini terpuruk jatuh pada kriteria kecukupan dan ketepatan kultural, mengingat pendekatan teknokratis yang terlampau kaku ini sama sekali mengabaikan aspek edukasi perubahan perilaku asuh balita di ruang domestik keluarga, sehingga hanya berstatus sebagai solusi yang teramat parsial. Di sisi lain, alternatif kedua meraup poin evaluasi sempurna pada aspek ketepatan kultural berkat pelibatan tokoh agama yang terbukti ampuh secara psikologis meruntuhkan mitos gizi di tengah masyarakat pedesaan. Namun, opsi populis ini mengandung risiko kegagalan tingkat tinggi pada aspek efektivitas operasional manakala para kader gampong ditinggalkan bekerja sendirian tanpa adanya dukungan intervensi pembangunan infrastruktur fisik, seperti fasilitas akses air bersih dan sanitasi, dari jajaran birokrasi pemerintah kabupaten.

Menyikapi celah kelemahan fatal dari dua opsi sebelumnya, alternatif ketiga tampil mendominasi dengan perolehan akumulasi skor tertinggi sebesar dua puluh sembilan poin dan meraih nilai nyaris sempurna di seluruh parameter pengukuran objektif. Secara tingkat efektivitas dan derajat kecukupan, perpaduan antara disiplin *budget tagging* di level kekuasaan kabupaten dan aktivasi rekayasa sosial di level otonomi gampong berhasil memastikan bahwa ketersediaan fasilitas fisik oleh negara selalu secara mutlak dibarengi dengan peningkatan literasi pemanfaatannya oleh warga setempat. Pada dimensi efisiensi fiskal dan asas pemerataan kesejahteraan, opsi unggulan ini memelopori skema berbagi beban pembiayaan (*cost-sharing*) yang amat cerdas, di mana kekuatan finansial APBD difokuskan murni untuk intervensi konvergen infrastruktur lintas sektor, sedangkan aliran Dana Desa dioptimalkan sepenuhnya bagi biaya operasional penyuluhan kader dan pemberian insentif sosial. Keberhasilan gemilang dalam menjembatani tuntutan kepatuhan birokrasi negara modern dengan upaya menjunjung tinggi kehormatan kultural masyarakat Pidie inilah yang pada akhirnya menahbiskan alternatif ketiga sebagai rute penyelesaian masalah yang paling rasional, sangat implementatif, dan paripurna.

## KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian sintesis penelaahan data empiris dan proses evaluasi kebijakan yang telah diurai secara komprehensif sedari awal, dapat ditarik sebuah kesimpulan absolut bahwa tingginya prevalensi stunting ekstrem di desa-desa lokus rentan bukanlah semata-mata diakibatkan oleh ketiadaan alokasi program bantuan dari pemerintah. Endapan residu kultural yang melahirkan aneka ragam mitos pengasuhan yang keliru, ditambah dengan kelumpuhan disfungsi konvergensi akibat tajamnya belenggu ego sektoral antar-instansi birokrasi, merupakan dua bentuk patologi utama yang sukses melumpuhkan efektivitas mesin penanganan stunting di Kabupaten Pidie. Di tengah tebalnya ilusi keberhasilan agregat kabupaten yang secara angka makro tampak sangat rendah memuaskan di persentase 5,51 persen, realitas potret spasial yang compang-camping di tingkat tapak membuktikan perlunya perombakan strategi haluan secara mendasar. Penilaian kebijakan berbasis parameter instrumen William Dunn telah membuktikan secara valid dan saintifik bahwa opsi Integrasi Tata Kelola Inovatif dan Rekayasa Sosial merupakan satu-satunya desain instrumen kebijakan publik yang memiliki daya ungkit paling memadai untuk menjinakkan krisis ganda tersebut secara simultan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2025). Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pidie 2025. BPS Kabupaten Pidie.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. (2026). Kabupaten Pidie dalam angka 2026. BPS Kabupaten Pidie.*
- Bappeda Kabupaten Pidie. (2025). Laporan analisis situasi: Upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting tingkat Kabupaten Pidie. Pemerintah Kabupaten Pidie.*
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Pelaksanaan aksi konvergensi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Buku saku hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.*
- Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.*
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). Panduan penulisan policy paper bagi jabatan fungsional perencana. Pusbindiklatren Bappenas.*

- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Ringkasan kajian: Gizi buruk dan stunting pada anak di Indonesia*. UNICEF.
- World Bank. (2022). *Investing in early years: Economic impact of stunting in Indonesia*. World Bank Group.
- World Health Organization. (2024). *Child malnutrition: Stunting among children under 5 years*. WHO Press.
- Young, E., & Quinn, L. (2003). *Writing effective public policy papers: A guide for policy advisers in Central and Eastern Europe*. Open Society Institute.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. (Teori Utama Bab II)
- Budiastutik, I., & Rahfiludin, M. Z. (2019). *Faktor risiko stunting pada anak di negara berkembang*. *Amerta Nutrition*, 3(3), 122-129. (Terindeks SINTA)
- Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Widyaningsih, V., Gebremedhin, T. A., & Herdiyanti, H. (2021). *Beyond personal factors: Multilevel determinants of childhood stunting in Indonesia*. *PLOS One*, 16(11), e0260265. (Terindeks Scopus Q1)
- Panggabean, S. A., & Budiarti, E. (2023). *Analisis kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat daerah*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 12(1), 34-42. (Terindeks SINTA)
- Rahmadhita, K. (2020). *Permasalahan stunting dan pencegahannya*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225-229. (Terindeks SINTA)
- Rosha, B. C., Susilowati, A., Amaliah, N., & Permanasari, Y. (2020). *Determinan kejadian stunting balita usia 6-59 bulan di Provinsi Aceh*. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(2), 101-112. (Terindeks SINTA - Rujukan Spesifik Konteks Budaya Aceh)
- Sutarto, S., Mayasari, D., & Indriyani, R. (2020). *Stunting, faktor resiko dan pencegahannya*. *Jurnal Agromedicine*, 5(1), 540-545. (Terindeks SINTA)
- Yustiyani, Y., & Setiawan, A. (2021). *Peran kader posyandu dalam edukasi perubahan perilaku gizi komunal*. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia*, 4(2), 150-158. (Terindeks SINTA - Rujukan Peran KPM)